

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI PUSKESMAS DI KOTA MANADO

Inricka Cristy Sondakh\*, Grace E.C. Korompis\*, Chreisy K.F. Mandagi\*

\*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado

### ABSTRAK

Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2015 tentang Puskesmas (pasal 39) menyebutkan bahwa puskesmas wajib diakreditasi dan dilaksanakan secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali. Untuk itu penting memahami proses pelaksanaannya tidak hanya mengenai apa yang berhasil dan tidak berhasil, tetapi juga memahami bagaimana dan mengapa implementasi berjalan dengan benar atau salah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informasi dikumpulkan dari 8 informan dari kedua puskesmas dengan menggunakan metode Triangulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang diperlukan dan data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan informan yakni wawancara mendalam. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan akreditasi puskesmas di kedua puskesmas dilakukan dengan beberapa tahap, dari faktor pendukung seperti persiapan dalam akreditasi puskesmas hingga peran puskesmas dalam menghadapi faktor penghambat yaitu kendala-kendala dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas. Terdapat perbedaan dari kedua puskesmas dalam melakukan persiapan untuk akreditasi puskesmas. Puskesmas Tuminting melakukan persiapan disesuaikan dengan pedoman yang dipakai dalam akreditasi puskesmas. Dan untuk Puskesmas Minanga melakukan persiapan dari bidan SDM dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

**Kata kunci :** Implementasi Kebijakan, Akreditasi Puskesmas

### ABSTRACT

Minister of Health Regulation No. 75 Year 2015 about health center (article 39) states that health center must be accredited and carried out regularly at least once every three years. For this reason it is important to understand the implementation process not only about what works and what does not, but also understanding how and why the implementation is going right or wrong. This study used qualitative research methods. Information was collected from 8 informants from both health center using the Triangulation method. Data collection is done by collecting secondary data that is the documents needed and primary data which is done by direct interviews with in-depth interview informants. The results obtained were the implementation of health center accreditation in both health center carried out in several stages, from supporting factors such as preparation in health center accreditation to the role of health center in dealing with inhibiting factors namely obstacles in implementing health centers accreditation. There are differences between the two health center in making preparations for health center accreditation. Tuminting health centers make preparations tailored to the guidelines used in health center accreditation. And for Minanga health center do preparations from the HR midwife and prepare the required documents.

**Keyword :** Policy Implementation, Health Center Accreditation

## PENDAHULUAN

Beberapa peraturan yang melandasi kebijakan akreditasi puskesmas seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (pasal 39) menyebutkan bahwa Puskesmas wajib akreditasi dan dilaksanakan secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga peraturan menteri kesehatan nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (pasal 6) menyebutkan bahwa akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensialing bagi

fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 75 Tahun 2014 tentang puskesmas, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dengan demikian,

puskesmas menjadi fasilitas kesehatan terdepan dalam upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Kebijakan puskesmas yang tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yaitu pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA dan KB, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan jiwa, upaya kesehatan gigi masyarakat, pengobatan tradisional komplementer dan alternatif, UKS, kesehatan indera, kesehatan lansia, serta kesehatan kerja dan olahraga. Untuk itu maka penting untuk memahami proses pelaksanaannya tidak hanya mengenai apa yang berhasil dan tidak berhasil, tetapi juga tetapi juga memahami bagaimana dan mengapa implementasi berjalan dengan benar atau salah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Manado jumlah puskesmas yang ada di Manado sendiri berjumlah 16 puskesmas. Dua diantaranya belum terakreditasi enam puskesmas terakreditasi dasar dan delapan puskesmas terakreditasi madya

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Informan penelitian ini adalah orang yang memiliki informasi tentang implementasi kebijakan akreditasi

puskesmas. Wawancara menggunakan pedoman wawancara, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai gambaran implementasi kebijakan akreditasi puskesmas tersebut. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di dua puskesmas yang berbeda status akreditasi yaitu Puskesmas Minanga yang terakreditasi dasar dan Puskesmas Tuminting yang terakreditasi madya. Sedangkan untuk waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2020

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Pendukung dalam Implementasi Akreditasi Puskesmas**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Tuminting dan Puskesmas Minanga faktor pendukung dalam implementasi akreditasi di kedua puskesmas tersebut terdapat perbedaan dalam melakukan persiapan Akreditasi Puskesmas dan Kebijakan yang di ambil dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas. Puskesmas Tuminting yang merupakan puskesmas yang status akreditasi Madya lebih mempersiapkan Akreditasi disesuaikan dengan mengikuti standar penilaian akreditasi puskesmas, sedangkan Puskesmas Minanga yang merupakan puskesmas dengan status akreditasi Dasar lebih mempersiapkan akreditasi puskesmas dibidang SDM terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. untuk kebijakan yang diambil

puskesmas Tuminting memberikan pelatihan khusus untuk setiap pegawai yang ada demi meningkatkan kualitas kinerja dari pegawai puskesmas. Sedangkan Puskesmas Minanga yang status akreditasi Dasar mengambil kebijakan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

1. Untuk tujuan utama akreditasi puskesmas, peran dan dukungan dari Dinas Kesehatan, instrumen yang dipakai serta ketersediaan SDM dalam pelaksanaan Akreditasi Puskesmas tidak ada perbedaan pendapat dari kedua Puskesmas tersebut.

#### **Faktor Penghambat dalam Proses Akreditasi Puskesmas**

Berdasarkan hasil penelitian dari kedua puskesmas yaitu Puskesmas Tuminting dan Puskesmas Minanga, kendala yang di hadapi dalam akreditasi Puskesmas Tuminting dalam hal sarana prasarana sama dengan Puskesmas Minanga, namun puskesmas Minanga juga masih merasa kesulitan dalam menggunakan pedoman akreditasi puskesmas karena pedoman yang susah dimengerti. Untuk peran Dinas Kesehatan dan puskesmas dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas memiliki perbedaan. Di Puskesmas Tuminting yang merupakan status akreditasi Madya, Dinas Kesehatan sering melakukan kunjungan supervisi dan

memberikan anggaran. Sedangkan di menurut pihak Puskesmas Minanga Dinas Kesehatan hanya melakukan kunjungan supervisi dan memberikan pembinaan. Sedangkan peran dari pihak kedua puskesmas sendiri dalam menghadapi kendala-kendala tersebut berbeda. Puskesmas Tuminting lebih berinisiatif menggunakan dana operasional puskesmas, sedangkan Puskesmas Minanga lebih memilih untuk langsung merespon balik kepada Dinas Kesehatan apabila ada keterlambatan dalam proses pengadaan sarana prasarana.

#### **Dampak dari Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Puskesmas**

Dari hasil penelitian di kedua Puskesmas tentang dampak dari implementasi akreditasi puskesmas tidak terdapat perbedaan yang signifikan yaitu dari tingkat akreditasi yang ingin dicapai Puskesmas, tujuan utama Puskesmas dalam Implementasi Akreditasi, serta peningkatan kualitas pelayanan yang memiliki peningkatan dalam pengimplementasian akreditasi puskesmas.

#### **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Tuminting dan Puskesmas Minanga faktor pendukung dalam implementasi akreditasi di kedua puskesmas tersebut terdapat perbedaan dalam melakukan persiapan Akreditasi Puskesmas, kebijakan yang di ambil

dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas, dan ketersediaan sarana prasarana.

2. Berdasarkan hasil penelitian dari kedua puskesmas yaitu Puskesmas Tuminting dan Puskesmas Minanga, kendala yang di hadapi dalam akreditasi Puskesmas Tuminting dalam hal sarana prasarana sama dengan Puskesmas Minanga, namun puskesmas Minanga juga masih merasa kesulitan dalam menggunakan pedoman akreditasi puskesmas karena pedoman yang susah dimengerti.
3. Dari hasil penelitian di kedua Puskesmas tentang dampak dari implementasi akreditasi puskesmas tidak terdapat perbedaan yang signifikan yaitu dari tingkat akreditasi yang ingin dicapai Puskesmas, tujuan utama Puskesmas dalam Implementasi Akreditasi, serta peningkatan kualitas pelayanan yang memiliki peningkatan dalam pengimplementasian akreditasi puskesmas.
4. Dari hasil penelitian yang didapat dari Puskesmas Tuminting dan Puskesmas Minanga terdapat perbedaan dalam melakukan persiapan untuk akreditasi puskesmas. Puskesmas Tuminting melakukan persiapan disesuaikan dengan pedoman yang dipakai dalam akreditasi puskesmas. Dan untuk Puskesmas Minanga melakukan persiapan dari bidang SDM dan

mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan

## SARAN

1. Pihak Puskesmas harus lebih mempelajari tentang pedoman akreditasi puskesmas termasuk seluruh pegawai puskesmas agar proses pelaksanaan akreditasi puskesmas dapat berjalan dengan baik
2. Pihak puskesmas harus mempertimbangkan pegawai yang masih belum berkompeten dibidang kesehatan agar mampu menjalankan setiap tugas tanpa kendala apapun.
3. Pihak Dinas Kesehatan harus lebih mendukung untuk penganggaran di bidang kesehatan dalam proses akreditasi puskesmas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita P. 2013. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Gorua Kecamatan Tobelo utara Kabupaten Halmahera Utara. (Online). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jia/article/view/2482>. Di Akses pada 26 Agustus 2019.
- Dedi. 2012. Manajemen Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika
- Departemen Kesehatan RI, 2004. Manajemen Puskesmas 2004. Penerbit Depkes RI. Jakarta
- G. Subarsono, 2005. Nalisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy

- Analisis. Gava Media: Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Gava Media: Yogyakarta
- Kemenkes RI. 2015. Peraturan Menteri Kesehatan RI. 2014 Nomor 75 tentang Puskesmas. Depkes RI. Jakarta
- Kementrian Kesehatan RI. 2015. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas. Depkes RI. Jakarta.
- Muninjaya. 2004. Manajemen Kesehatan: Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- Molyadi. 201. Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Puskesmas Di Kabupaten Kubu Raya. (Online). (<https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/25486>). Di Akses pada 26 Agustus 2019
- Nissa F. 2016. Analisis Kesiapan Akreditasi Dasar Puskesmas Mangkang Di Kota Semarang. (Online) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/13946>. Diakses pada 28 Agustus 2019.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rineka. Cipta. Jakarta.
- Susanti, 2018. Pengaruh Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mewujudkan Produktivitas Kerja. (Online) (<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/283/255>). Di Akses pada 28 Agustus 2019
- Susilawati. 2016. Gambaran Implementasi Akreditasi Puskesmas Di Kabupaten/Kota
- Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016. (Online). (<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/download/1193/941>) . Di Akses pada 25 Agustus 2019
- Usman. 2006. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Cetakan Pertama. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Zamora B. 2012. Implementasi Kebijakan Dan Sertifikasi Pelatihan Di Bidang Kesehatan. (Online) (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313727-T3132Implementasi%20kebijakan.pdf>). Di Akses pada 28 Agustus 2019.